

# Pendidikan Luar Sekolah Menyambut Masyarakat Belajar

M. Bambang WALGITO\*

Menarik untuk dilihat betapa akhir-akhir ini beberapa harian terkemuka, baik harian ibukota maupun daerah, sibuk mengisi lembaran-lembarannya dengan aneka peristiwa dan ulasan seputar dunia pendidikan, baik mengenai mutu, jumlah anak didik yang dihasilkan oleh suatu jenjang pendidikan, rintihan para orang tua yang sibuk mencari lowongan kursi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun ramalan tentang jumlah peserta Sipenmaru yang konon "melejit" menjadi satu juta jiwa, dan sebagainya.

Menarik untuk disimak betapa semuanya itu merupakan suatu musim, yang pada saat-saat tertentu tampak mengganas, mengharukan siapa pun yang merasa diri sebagai warga bangsa. Suatu musim yang sesuai dengan iklim pemikiran serta budaya kita akan mereda dengan sendirinya dengan meninggalkan pertanyaan yang belum sempat terjawab: *what next*. Justru pada momen-momen peredaan inilah tulisan ini disajikan dengan harapan menggelitik sebagian besar warga bangsa. Andaikan pemikiran ini ikut tenggelam dalam arus peredaan, masih ada harapan, semoga apa yang disajikan ini paling tidak akan ikut hidup bergerak dalam kekuatan besar manusia, yakni "dunia bawah ambang kesadarannya." Dunia semacam itu penting karena akan memberi motivasi tertentu pada saat menghadapi krisis. Karena, yang terpenting adalah motivasi pemahaman kritis terhadap krisis yang terjadi di lingkungannya ataupun yang dialaminya sendiri kelak kemudian hari. Krisis tersebut cepat ataupun lambat akan terjadi. Dalam menghadapi tantangan, orang lantas mengambil sikap kritis dan dengan sikap kritis tersebut akan terpetik hasil utama, yakni *kemampuan ataupun kemandirian masing-masing individu* dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks.

---

\*Staf CSIS.

Sebagai suatu irama, menarik pula untuk dikaji betapa "musim yang penuh hiruk-pikuk" yang terjadi setahun sekali ini semakin lama semakin melibatkan banyak orang muda Indonesia yang bagaikan "lautan" bergerak ke sana ke mari berebut meloloskan diri dari "lubang-lubang jarum" yang dirasa semakin menyempit. Paling tidak ada dua "lubang jarum" yang tampaknya saling bertentangan. Di satu pihak, bagaikan "gelombang samudra" manusia-manusia muda usia berebut tempat pendidikan sebagai pabrik ijazah yang -- entah dari mitos mana dan siapa bikin walahu'alam -- diidentikkan dengan jabatan pegawai dengan gaji enak dan hidup lumayan. Di lain pihak, muncul "lubang jarum" kedua, yakni lapangan kerja ataupun penciptaan lapangan kerja yang memiliki mekanisme tersendiri dengan aneka persyaratan keterampilan yang kiranya belum atau tidak dibekalkan pada hasil asuhan sekolah. Gerak meloloskan diri dari dua "lubang jarum" tersebut memberi dampaknya sendiri-sendiri, karena baik bagi yang berhasil lolos dari "lubang jarum" pertama apalagi yang gagal sama-sama didorong oleh kebutuhan yang sama dengan dimensi yang makin hari makin tampak menjadi cuma satu, yakni "menjadi pegawai." Apakah berdimensi satu ini sudah membudaya atau belum dapat dikaji dari keras-lembutnya "irama musiman" yang terjadi setiap tahun.

Lebih menarik pula untuk dibaca betapa masyarakat seolah-olah menerima semuanya itu sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan, yang akhirnya diterima sebagai suatu kewajaran tanpa sempat bertanya diri "wajarkah semuanya ini?" "akan dibawa kemanakah manusia-manusia muda yang tidak berhasil lolos lubang jarum pertama apalagi kedua?" "sekiranya mereka itu dapat tenang di luar musim gejolak tahunan karena kuatnya 'tanggul' (manusia pekerja atau produktif yang memberi mereka makan dan tempat bernaung) mungkinkah mereka itu hanya bergerak pada musim tertentu saja dan tidak di luar musim karena jebolnya beberapa 'tanggul' akibat kelebihan beban?" Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu pernah tersirat dalam benak setiap orang.

Ada beberapa usaha penting yang sudah dan sedang dilakukan, seperti akan disinggung sekilas dalam tulisan ini, yang pada hakikatnya tampak sebagai usaha memperbesar lubang jarum yang telah ada, yang tentunya diharapkan tidak sekedar *symptomatic treatment*. Adanya sekolah-sekolah "Terbuka" baik SLTP, SLTA, ataupun bahkan Universitas yang "Terbuka," yang dengan bertambahnya usia diharapkan memiliki mekanisme kerja yang efektif dan mampu menyalurkan hasrat manusia-manusia muda tersebut. Namun, dapat dipertanyakan apakah itu bukan sekedar usaha memperbesar satu lubang jarum saja yang akhirnya akan membangkitkan atau semakin menumbuhkan budaya berdimensi satu seperti tersebut di atas?

Apakah sekolah ataupun universitas yang "terbuka" sudah memiliki mekanisme kerja yang efektif atau belum tentu bukan tempatnya disinggung dalam tulisan ini. Untuk memiliki sistematika kerja yang baik, dengan sendirinya dibutuhkan waktu dan pengalaman untuk tidak sekedar menjadi kursus tertulis, sebab dapat diduga bahwa penanganan distribusi dan evaluasi pun sudah merupakan kerja yang aduhai dilihat dari kacamata mereka yang tiap hari berkecimpung di dunia pendidikan langsung, yang bukan sekedar pengamat dari luar; belum lagi masalah proses belajar-mengajar yang masih membutuhkan berbagai pengandaian untuk dapat efektif dan efisien.

Ada beberapa usaha menarik lainnya, baik berupa usaha konkret, seperti munculnya BLK (Balai Latihan Kerja), lembaga-lembaga politeknik di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera, maupun seruan-seruan dan himbauan. Tak urung almarhum Mendikbud sendiri dalam berbagai kesempatan mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah pola berpikir yang terlalu mendewakan perguruan tinggi, bahkan media massa pun diajak berperan serta secara aktif untuk mempropagandakan sekolah-sekolah kejuruan baik menengah maupun tinggi.<sup>1</sup> Kesemuanya itu merupakan usaha mengubah tata nilai yang terlanjur membudaya. Perubahan yang diinginkan ini pada hakikatnya merupakan karya "raksasa" yang tak mungkin dibebankan pada pemerintah ataupun satu departemen (Depdikbud) apalagi pada pundak seorang manusia kendati itu Mendikbud walaupun bisa diawali lewat "mulut" satu manusia.

## MENGACA SEJARAH

Dalam sekilas membolak-balik sejarah pendidikan di bumi Nusantara ini sejak jaman kolonial sampai hari ini, terlihat jelas perubahan pesat mengenai kuantitas dan kualitas manusia Indonesia yang sempat mengenyam pendidikan menengah dan tinggi. Jika di jaman kolonial hanya beberapa gelintir manusia Indonesia, baik pribumi maupun keturunan asing, diperkenankan mengenyam pendidikan tinggi di Stovia ataupun Sekolah Tinggi Teknik Bandung (antara lain Ir. Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI), maka jumlah tersebut sudah meningkat tajam dalam kurun satu generasi.

Di kala manusia terdidik masih merupakan "makhluk langka," telah tumbuh dalam tubuh masyarakat sendiri gerakan pendidikan yang dapat dibilang Pendidikan Luar Sekolah. Kecil mungkin peran dan jumlahnya jika dilihat dari ruang lingkup nasional dan kiranya juga perlu penelitian meluas dan mendalam tentang jumlah dan siapa-siapa yang merupakan hasil penggodokan

<sup>1</sup>Lihat Tajuk Harian *Sinar Harapan*, 29 Mei 1985.

lembaga-lembaga semacam itu. Yang jelas mereka itu memang ada, kendati dianggap kecil dan dipandang sebelah mata. Begitu tidak berarti tampaknya sampai-sampai eksistensinya tidak ikut terekam apalagi diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang masih berlaku sampai hari ini. Betapapun, mereka tetap ada bahkan tumbuh subur terlebih akhir-akhir ini. Suatu angin segar telah bertiup kendati belum membuahkan perubahan arus bagi "lautan" manusia muda yang tampak bergolak hanya di musim tertentu saja.

Lembaga-lembaga kecil yang sering dipandang sebelah mata ini akhirnya sempat terekam oleh para wakil rakyat dan dicetuskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dan yang kemudian secara lebih jelas lagi terungkap dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 juga tentang GBHN dalam Bab Pendidikan. Jika dalam Tap No. IV/MPR/1978 kita jumpai formulasi: "Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan ....", dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 kita baca: "Pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan ....", maka kelihatan ada suatu perubahan *sikap* dalam masyarakat itu sendiri. Formulasi tersebut memang dapat dibilang merupakan suatu momen-momen opname yang tentu harus dibaca pula apa yang tersirat di dalamnya. Membaca yang tersirat umumnya lebih menarik apalagi kalau disertai secercah harapan semoga dalam Tap berikut terungkap formulasi yang lebih jelas dan merangsang.

Harapan tak akan kunjung tiba apabila pernyataan yang tersurat dan tersirat dalam Tap MPR tadi hanya berhenti menjadi kumpulan aksara yang mati. Apa yang direkam di situ bukanlah "benda mati" namun "benda hidup" yang dalam sejarah pendidikan di Indonesia terbukti merupakan "benda tahan bantingan," benda yang memiliki daya hidup tinggi. Satu hal yang jelas bahwa benda tahan bantingan tersebut bukan "anak haram" kendati bukan "anak emas" dan memang tidak perlu menjadi anak emas sebab akan berada di luar jalur dan proporsi yang wajar sehingga mungkin akan mengurangi daya hidupnya yang tinggi.

Daya hidup tinggi itu dimungkinkan karena lembaga-lembaga PLSM, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Diklusemas (Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat) berakar kuat pada masyarakat, masyarakat yang sadar akan kebutuhannya, masyarakat yang haus akan kemajuan. Dari program latihan dan pendidikan yang sederhana, terlihat adanya latihan berpikir yang membuat manusia berusaha membebaskan diri dari segala himpitan dan ketergantungan. Di sini terlihat betapa manusia berusaha keras membantu dirinya sendiri mendada masa depan. Masa depan bukan sekedar diartikan sebagai lapangan kerja, tetapi lebih luas lagi dan luhur, yakni pertumbuhan manusia dari yang sadar akan kekurangannya menjadi manusia



yang memiliki keterampilan dan ilmu. Dalam hal ini daya kreativitas manusia tergugah.

Kreativitas merupakan istilah yang agaknya terlalu banyak di "dengang-dengungkan" sedemikian rupa sehingga tampak begitu luhur hingga seolah jauh dari jangkauan manusia biasa. Dari apa yang terjadi dalam gerak pendidikan luar sekolah ini terlihat betapa ada sebagian warga masyarakat yang tergerak untuk secara etis turut serta mencerdaskan atau meningkatkan bakat anggota masyarakat lainnya sampai titik optimal sesuai dengan harkat dan hakikat masing-masing individu. Gerak mereka itu mungkin kecil dan bisa jadi sederhana. Tetapi bukankah perkembangan-perkembangan pesat seringkali berawal dari yang kecil?<sup>2</sup> Bukan hal yang aneh bahwa beberapa "warga belajar" (sebutan yang dalam pendidikan formal berarti murid) bahkan pula pengasuh Diklusemas atau PLSM merupakan otodidak yang sebenarnya kelewat sayang apabila dilewatkan begitu saja. Seperti pernah disinyalir oleh Bachtiar W. Rifai<sup>3</sup> banyak otodidak yang "kelewat ulet" yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh dunia pendidikan formal. Tentu amat disayangkan apabila sinyalemen tersebut benar. Memang dibutuhkan kejelian tersendiri untuk menangkap mereka, belum lagi masalah fleksibilitas birokrasi dan tolok ukur persyaratan yang berlaku. Seandainya banyak dari mereka dapat "ditangkap" barangkali hal ini akan memberi gambaran tersendiri dalam persepsi kaum muda bahwa ada alternatif lain untuk menjadi sukses, pandai, ataupun berhasil. Jadi bukan sekedar lewat satu jalur yang diperebutkan seperti sekarang ini.

## MENUJU MASYARAKAT BELAJAR

Kendati mungkin tidak dapat diterima sepenuhnya ide-ide revolusioner dari beberapa *innovator* terkemuka karena kondisi dan situasi sosial kita mungkin berlainan, namun ada baiknya disimak sejenak beberapa buah pemikiran Ivan Illich yang menggelitik hati sanubari siapa pun yang membacanya. Dalam bukunya yang menarik seperti "Deschooling Society" ataupun dalam artikel-artikelnya misalnya "Alternative to schooling" dengan tegas dikatakan: "In order to see clearly the alternatives we face, we must distinguish education from schooling ...."<sup>4</sup> Di sini tampak ia menghimbau ma-

<sup>2</sup>Slamet Sutrisno, "Universitas Terbuka Kondisi Awal Bagi Masyarakat Belajar," *Suara Karya*, 14 Februari 1984.

<sup>3</sup>Lihat, *Suara Karya*, 8 Mei 1984.

<sup>4</sup>Ivan Illich, "The Alternative to Schooling" dalam John Martin Rich, *Innovations in Education, Reformers and Their Critics* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc., 2nd edition, 1978), hal. 142-153; lihat juga Ivan Illich, *Deschooling Society* (London: Galder & Boyars, 1974).

syaratnya untuk melepaskan anggapan bahwa apa yang tidak diberikan lewat sekolah seolah-olah tidak bermutu, seolah hanya sekolahanlah yang mampu memberi bekal bermutu bagi para remaja dalam memasuki kedewasaannya dalam masyarakat. Lagipula, dengan gaya menggelitik dikatakannya: "learning *about* the world is more valuable than learning *from* the world."<sup>5</sup>

Tentulah bukan dimaksudkan di sini untuk ramai-ramai membubarkan sekolah, sebab pendidikan formal dan umum memang mutlak diperlukan, bahkan eksistensi pendidikan tinggi mutlak tidak dapat ditawar lagi. Bahwa kurikulum perlu diperbaharui untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, semua orang sudah maklum dan memang sedang terus-menerus dilakukan oleh mereka yang berwenang, dalam hal ini Depdikbud dengan segala aparatnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam situasi seperti sekarang ini negara dan masyarakat amat membutuhkan suatu *Elite Intelektual* yang diharapkan mampu dilahirkan oleh aneka pendidikan tinggi di negara kita. Suatu kelompok *Elite Intelektual* dalam arti yang baik seperti baru-baru ini diutarakan J. Drost, seorang pendidik dan pengamat masalah sosial-budaya, "... mustahil suatu negara dapat maju pesat tanpa dukungan kelompok *Elite Intelektual*."<sup>6</sup> Kelompok ini tentu diharapkan untuk tidak bercita-cita menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri, namun pemikir, politisi, pencipta lapangan kerja dan sebagainya, yang penuh harapan luhur.

Harapan luhur tersebut untuk masa sekarang mungkin dirasa terlalu tinggi kendati bukan kemustahilan. Bukan barang yang aneh sekiranya para pengelola, pengasuh, maupun pengajar pendidikan tinggi swasta dituntut kreativitas tinggi untuk *survive* dan kalau dapat unggul dari yang lain. Hal ini hanya akan dapat diraih apabila mereka mampu, jeli, dan pandai dalam *memainkan peran* "mengikuti panutan" di satu pihak dan "mencari" panutan di lain pihak. Yang dimaksud dengan "mengikuti" di sini adalah menuruti dan mencontoh standar yang berlaku atau mengaca pada perguruan tinggi negeri yang harus dijadikan panutan, sedangkan "mencari" berarti "belajar" dari apa yang biasa diberikan oleh *mereka yang terbaik* dalam lingkup nasional, regional, maupun dunia internasional dengan harapan bahwa produk mereka dapat "laku" dengan mudah di masyarakat. "Laku" di sini bisa diartikan "gampang memperoleh pekerjaan." Pada akhirnya, masyarakat itu sendirilah yang menilai mana yang baik dan mana yang kurang. Karena masalah ini merupakan masalah peka yang menyangkut hidup matinya institut dan secara langsung mempengaruhi "periuk nasi" para pengelola, karyawan edukatif dan lain-lain, maka dengan sendirinya mereka terpaksa menjadi mahir, ulet berkat "godokan" alam.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 144.

<sup>6</sup>Lihat *Surabaya Post*, 24 Mei 1985.

Ada berbagai himbauan untuk segera mendirikan banyak sekolah kejuruan. Prof. Andi Hakim Nasution, misalnya, bahkan menyerukan supaya kita berhenti omong tetapi langsung berbuat sesuatu, supaya budaya omong segera dihapuskan.<sup>7</sup> Ajakan ini yang lebih banyak diserukan bagi jajaran Depdikbud sendiri kiranya terlalu sayang kalau dilewatkan begitu saja. Semoga dan tentu amat dinantikan oleh seluruh masyarakat.

Berbagai ajakan yang disinggung di atas pada akhirnya harus bermuara pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang dimaksudkan di sini bukan masyarakat muda yang lebih banyak disorot selaku pelaku utama dalam drama besar yang berkiprah di musim khusus ini, namun seluruh masyarakat perlu belajar, bukan sekedar belajar dari pengalaman namun belajar tentang realita konkret yang ada. Mumpung peringatan "Hardiknas" bahkan "Harkitnas" belum lama lewat dan masih dapat ditimba hikmah karena "gema"-nya tentulah masih bersisa. Dengan "mengaca sejarah" seperti disinggung di atas, masyarakat perlu belajar bahwa dia mampu berbuat sesuatu untuk dirinya, dan tidak menanti uluran orang lain, dalam hal ini pemerintah atau Depdikbud. Seorang montir jalanan yang terbuka hati dan sadar akan kemampuannya dapat mengambil beberapa pemuda untuk dididik menjadi "asisten"-nya yang nanti akan mampu meringankan "cucuran keringat"-nya namun yang sekaligus mampu mempertebal "kocek"-nya. Sudah barang tentu pertama-tama mereka ini harus dianggap bukan sebagai saingan atau calon saingan yang akan menguruskan koceknnya, sebab membuat orang menjadi saingan atau kawan/rekan memang ada ilmunya. Ilmu itu tak lain hanyalah "keterbukaan dan ketulusan." Betapapun orang tidak akan membunuh orang yang tulus yang telah membesarkannya dengan tulus. Pengangkatan asisten sering oleh para cerdik-pandai diberi istilah ilmiah seperti "career education" atau "pendidikan magang" seperti pernah dilontarkan dalam berbagai artikel dan tulisan di beberapa harian dan majalah.

## MASYARAKAT BELAJAR

Masyarakat perlu belajar tentang dirinya dan situasi yang tengah dihadapi. Menghadapi ledakan lulusan SD, SLTP dan SLTA Kejuruan ataupun Umum, belum lagi lulusan perguruan tinggi bahkan juga yang putus sekolah yang "berlomba dengan segala akal untuk dapat lolos dari dua lubang jarum" tersebut di atas, masyarakat secara keseluruhan perlu belajar. Cepat atau lambat akan semakin *disadari* bukan sekedar *diketahui* bahwa jumlah mereka yang tidak dapat ditampung akan semakin melampaui jumlah mereka yang berhasil ditampung, belum lagi kurangnya lapangan kerja.

<sup>7</sup>Lihat, harian *Sinar Harapan*, 30 Mei 1985.

Masyarakat yang menyadari situasi semacam itu dan berusaha sendiri mengatasi masalah mereka merupakan *masyarakat belajar* yang baik. Mereka akan belajar betapa lama menunggu uluran pihak lain sebab semuanya itu bukannya tanpa proyek dengan DIP-nya segala. Menunggu turunnya proyek akan sama dengan membiarkan bagian dari dirinya terbenam dalam "neraka frustrasi" yang dapat berakibat macam-macam. Perkembangan PLSM atau Diklusemas pada situasi seperti sekarang ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi sebab hal ini merupakan usaha masyarakat yang ingin menolong dirinya sendiri. Di samping lembaga yang sudah ada dan yang diharapkan tumbuh subur ini, tentunya diharapkan muncul pula lembaga-lembaga sejenis yang diawali dari tawaran para cerdik cendekia atau para ahli di bidangnya masing-masing, yang dengan sendirinya berdedikasi serta memiliki jiwa *entrepreneurship* yang lumayan. Uluran tangan semacam itu apabila ditangkap oleh para "tokoh" masyarakat yang merasa terlibat dan ikut memiliki "hitam-putihnya" bangsa ini akan menyuburkan "ladang-ladang" baru di tengah-tengah gejolak masyarakat luas.

Makhluk kuno yang sebenarnya sudah tumbuh sejak jaman kolonial dan terbukti memiliki daya hidup tinggi dapat diharapkan menjadi salah satu alternatif di samping pendidikan formal umum dan kejuruan. Dengan munculnya lembaga-lembaga tersebut kendati mungkin tidak begitu besar di sana-sini, paling tidak ada 2 keuntungan yang dapat diraih: (a) masyarakat terbina menjadi *warga belajar*, dan (b) masyarakat tidak kehilangan daya pikir kritis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka ataupun lingkungan mereka sendiri.

Memang ada kemungkinan mereka itu pertama-tama muncul sebagai suatu institusi komersial yang tidak memiliki sasaran edukatif yang jelas dan mapan. Kendati ada badan resmi dengan falsafah *tut wuri handayani* bertugas tidak hanya mengatur izin serta lalu-lintas pemunculan lembaga-lembaga semacam itu di masyarakat dan membinanya, namun menghadapi situasi semacam itu daya pikir kritis masyarakat pelan-pelan terbina. Di sini berlaku komunikasi dua arah di mana masyarakat secara kritis didorong oleh kebutuhan bersama akan pengetahuan dan keterampilan akan menilai sendiri mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Lembaga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan konkret tersebut akan tidak laku dengan sendirinya. Para pengasuh dan pengelola pun akan terpaksa belajar dari keadaan konkret masyarakatnya. Dengan didorong kebutuhan untuk survive, mereka akan belajar untuk menjadi "yang laku" di masyarakat, belajar mencari "nilai lebih" yang membuat mereka tampak unggul dibandingkan dengan yang lain.

Fleksibilitas "kurikulum" Diklusemas sebenarnya merupakan keunggulan tersendiri yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kurikulum pen-



didikan formal. Bertolak dari realita konkret mereka berusaha menyediakan hal-hal riil dan konkret yang amat diperlukan. Dalam hal ini "kurang lakinnya" pendidikan formal kejuruan yang kini diharapkan kembali digalakkan agar laku, merupakan pelajaran yang baik karena input-input masyarakat tidak tersalurkan. Mereka dididik seolah-olah untuk menerima saja apa yang disajikan tanpa diajak turut serta mencari apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Hubungan yang menonjol dalam dunia Diklusemas bukanlah hubungan antar guru dan murid, namun lebih antar sesama *warga belajar* yang sama-sama bertekad dalam kebersamaan men-"dada" hari esok yang cerah. Bukan barang tabu bila dalam kebersamaan ini ikut tertimba pula kenikmatan spiritual dan material. Bersama sebagai warga belajar mereka terbiasa hidup dalam situasi non-formal yang tidak terlalu kaku. Peningkatan karir atau usaha bukanlah barang tabu dalam situasi yang tidak kaku ini.

"Kecerahan" hari esok yang digambarkan di atas akan kembali menjadi "gelap," apabila program konsolidasi yang dicanangkan HP-PLSM (Himpunan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat) tidak berjalan lancar. Sebagai satu-satunya organisasi sosial-kultural di bidang pendidikan luar sekolah yang menjadi partner pemerintah, HP-PLSM yang baru didirikan pada tanggal 31 Agustus 1982 perlu terus-menerus mengkonsolidasi diri agar dapat dipertegas lagi identitas diri di tengah masyarakat belajar, sehingga masyarakat itu sendiri akan tertolong apabila pintu sekolah sudah tertutup bagi mereka. Konsolidasi yang bertahap, sistematis dan berkesinambungan sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Setiadi Kartohadikusumo<sup>8</sup> merupakan pembenahan dan peningkatan baik perangkat lunak (landasan hukum, landasan kerja, pola pembinaan dan pengembangan organisasi PLSM) maupun perangkat keras (organisasi dan tata kerja, program kerja jangka pendek/menengah/panjang, personalia, modal kerja, administrasi pendidikan dan lain-lain), di tingkat pusat maupun daerah.

Mengaca hiruk-pikuk musiman yang merupakan masalah seluruh masyarakat, peran-serta PLSM atau Diklusemas yang terus-menerus mengkonsolidasi diri itu diharapkan mampu mengubah nilai-nilai masyarakat sehingga mereka tidak lagi mengarah ke berdimensi yang cuma satu, yakni berebut ijazah yang diidentikkan dengan menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri semata.

---

<sup>8</sup>Drs. Setiadi Kartohadikusumo, *Konsolidasi Organisasi HP-PLSM Indonesia Sebagai Prasyarat Untuk Memelihara Kemampuannya dalam Mencapai Suatu Tujuan*, 17 Agustus 1984.